ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan *Siyāsah Syar'iyyah* dan Perda Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2006 terhadap Pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang", merupakan hasil kajian lapangan terhadap pelaksanaan Pilkadesa di Desa Daleman. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah: 1. Bagaimana tinjauan *Siyāsah Syar'iyyah* terhadapa Pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman? 2. Bagaimana tinjauan Perda Kab. Sampang No. 5 Tahun 2006 terhadapa Pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman?

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif-verifikatif*. Selanjutnya akan dianalisis menggunakan pola pikir deduktif.

Setelah dilakukan penelitian secara komprehensif, ditemukan bahwa proses dan mekanisme pemilihan Kepala Desa Daleman mulai dari pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), penjaringan bakal calon , kampanye, pemunggutan dan perhitungan suara, sampai pengumuman dan penetapan calon terpilih, panitia pemilihan sudah melakukan prosedur yang tidak bertentangan dengan *Syara'* atau *Siyāsah Syar'iyyah* (Sistem Politik Islam) dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No.5 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa namun dalam pelaksanaan ini salah satu calon melakukan praktik politik uang dan intimidasi, yang mana politik uang ini dilarang menurut *syara'* sebagaimana Hadist yang melarang terhadap praktik suap-menyuap, sedangkan intimidasi menyalahi nilai dasar *siyāsah syar'iyyah* tentang kemaslahatan dan hal ini juga tidak dibenarkan dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kab.Sampang No.5 Tahun 2006. Selain praktik politik uang dan intimidasi, Pilkades juga diwarnai dengan perjudian yang jelas-jelas praktik tersebut dilarang dalam Islam, namun dalam Perda tersebut belum di atur secara jelas tentang larangan praktik perjudian dalam pelaksanaan pilkades.

Dari hasil penelitian di atas, diharapkan semua masyarakat pada umumnya dan pejabat pemerintahan pada khususnya bisa menyelenggarakan pilkades dengan kondusif tanpa adanya politik uang, intimidasi dan perjudian, dan sekiranya mensosialisasikan kepada masyarakat terkait larangan tersebut karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui isi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No.5 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa.

Dan bagi para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Panitia Pemilihan Kepala Desa(P2KD) untuk dapat membuat peraturan dan pengarahan dalam pelaksanaan pilkades yang akan datang agar lebih baik dari sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id